

## **KINERJA ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH**

**Novelis<sup>1</sup>, Rulinawaty<sup>2</sup>, Andi Wijaya<sup>3</sup>**  
Universitas Terbuka<sup>1,2,3</sup>  
novellis120@gmail.com<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja organisasi satuan kerja perangkat daerah dalam pengelolaan aset daerah di BPKD Kabupaten Malianau. Metode penelitian yang dilakukann dengan kualitatif, dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling area*. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala BPKD, Sekretaris BPKD Kabupaten Malinau, Kepala Bidang Aset BPKD dan Staf BPKD Kabupaten Malinau. Hasil penelitian yang diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam dengan para informan kunci mengindikasikan adanya tingkat kesesuaian yang signifikan antara program kegiatan yang dijalankan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan, bentuk pertanggungjawaban Bidang Pengelolaan Aset Daerah dibuat yaitu dengan membuat laporan atas pengelola aset daerah kepada kepala Badan dan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, implementasi pengelolaan aset yang sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Simpulan, kinerja organisasi satuan kerja perangkat daerah dalam pengelolaan aset daerah di BPKD Kabupaten Malianau sudah baik yaitu dalam hal efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan tranparansi walaupun masih ada beberapa dalam pelaksanaanya

**Kata Kunci:** akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, dan tranparansi

### **ABSTRACT**

*This research aims to determine the organizational performance of regional work units in managing regional assets in BPKD Malianau Regency. The research method was carried out qualitatively, using purposive area sampling. The subjects in this research were the Head of BPKD, the Secretary of BPKD Malinau Regency, the Head of BPKD Assets, and the BPKD Staff of Malinau Regency. The research results obtained through a series of in-depth interviews with key informants indicate a significant level of conformity between the program of activities carried out by the Regional Asset Management Sector and the targets and objectives set. The accountability for the Regional Asset Management Sector is created by making a report on the asset manager. Regions to the head of the Agency and the Regional Secretary as property managers, as well as the implementation of asset management by applicable rules and regulations. In conclusion, the organizational performance of regional work units in managing regional assets in BPKD Malianau Regency is good in terms of effectiveness, efficiency, accountability, and transparency. However, there are still some problems in implementation.*

*Keywords: accountability, effectiveness, efficiency and transparency*

## PENDAHULUAN

Konsep otonomi daerah merupakan mekanisme yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk mentransfer dan mendistribusikan wewenang serta tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola aspek finansial dan non-finansial di wilayah yurisdiksinya (Rulinawaty et al., 2020). Hal ini menggambarkan transformasi paradigma dari sistem administratif yang tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi.

Pengelolaan BMD merupakan sebuah tantangan kompleks yang harus dihadapi oleh setiap pemerintah daerah. Kompleksitas ini muncul dari keragaman dan jumlah aset yang dimiliki, mulai dari aset tidak bergerak seperti tanah dan gedung, aset bergerak seperti kendaraan, hingga aset-aset *intangibile* seperti hak kekayaan intelektual. Untuk mengatasi tantangan multidimensi ini, dibutuhkan sebuah sistem manajemen yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Sistem ini harus mampu melakukan pencatatan, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh aset daerah secara akurat dan real-time. Selain itu, diperlukan juga formulasi kebijakan yang jelas, konsisten, dan adaptif dalam pengelolaan aset, yang selaras dengan kerangka regulasi yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah.

Efektivitas dalam pengelolaan BMD memiliki implikasi yang luas, tidak hanya pada aspek finansial pemerintah daerah, tetapi juga pada kualitas dan jangkauan layanan publik yang dapat diberikan. Aset-aset yang dikelola dengan pendekatan yang tepat dapat dioptimalkan penggunaannya untuk mendukung berbagai program dan layanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat. Sebagai contoh, properti milik pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menyediakan layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, atau pusat pelayanan administratif yang terintegrasi. Dengan demikian, manajemen BMD yang efektif tidak hanya berkontribusi pada efisiensi anggaran, tetapi juga berperan langsung dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Manajemen aset di level pemerintahan daerah merupakan sebuah tantangan yang memiliki kompleksitas tinggi dan bersifat multidimensional. Kompleksitas ini terefleksikan dari masih ditemukannya sejumlah pengecualian dalam penilaian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terkait kewajaran nilai aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala signifikan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD), yang berdampak pada penyajian data kekayaan daerah yang kurang akurat atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Implikasi dari ketidakakuratan ini bukan hanya terbatas pada aspek administratif semata, namun juga berpotensi mempengaruhi proses pengambilan keputusan strategis terkait dengan pengelolaan dan pengembangan aset daerah secara keseluruhan (Rulinawaty Kasmad et al., 2019).

Salah satu problematika utama dalam pengelolaan BMD adalah bagaimana menangani aset yang telah mengalami kerusakan, tidak lagi digunakan, atau bahkan hilang. Pelaporan BMD yang tidak akurat, termasuk mencantumkan aset yang seharusnya sudah dieliminasi dari daftar, berpotensi memberikan gambaran yang distortif mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah (Rulinawaty Kasmad et al., 2019). Untuk mengatasi permasalahan ini, implementasi prosedur penghapusan BMD menjadi langkah strategis yang perlu dipertimbangkan secara serius, terutama untuk kategori aset yang telah mengalami kerusakan parah atau tidak dapat ditemukan secara fisik.

Merujuk pada pandangan Mulyono, et al, (2018), penghapusan BMD merupakan salah satu solusi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah untuk menyelesaikan problematika terkait BMD yang sudah tidak memenuhi standar kelayakan atau tidak lagi ada secara fisik. Namun demikian, proses penghapusan ini harus dilaksanakan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara ketat. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan aset daerah, sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan dan memastikan optimalisasi manfaat bagi masyarakat luas.

Persoalan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan kota masih menjadi isu yang membutuhkan penanganan serius dan komprehensif (Rulinawaty; dkk, n.d.). Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya belum mencapai standar efisiensi yang diharapkan. Indikasi ini terlihat dari berbagai fenomena yang kerap terjadi di sejumlah institusi pemerintahan daerah, dengan salah satu contoh konkretnya adalah belum optimalnya manajemen persampahan. Di samping itu, pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada tantangan dalam menentukan hierarki prioritas program yang mampu mengakomodasi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis dan beragam (Rulinawati et al., 2024).

Salah satu indikator kinerja utama BPKD adalah peningkatan kualitas manajemen aset daerah. Namun, dalam implementasinya, capaian terkait jumlah sertifikat tanah dan pemasangan plang identifikasi belum memenuhi target yang ditetapkan. Data menunjukkan bahwa realisasi hanya mencapai 106 dari target awal 114 sertifikat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan aset tetap daerah, khususnya dalam aspek sertifikasi tanah milik daerah dan pemasangan plang kepemilikan, masih belum mencapai tingkat optimal. Situasi ini juga merefleksikan adanya kelemahan dalam kinerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terutama dalam hal optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah milik daerah secara efektif dan efisien.

Masalah yang dihadapi dalam kinerja organisasi mengenai pengelolaan aset di Kabupaten Malinau meliputi beberapa aspek krusial. Pertama, terdapat ketidaksesuaian antara pencatatan aset dalam laporan keuangan dengan kondisi fisik aset di lapangan, yang mengindikasikan kelemahan dalam sistem inventarisasi dan pemutakhiran data. Kedua, masih ditemukan sejumlah aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk tanah dan bangunan yang terbengkalai. Ketiga, proses sertifikasi tanah milik daerah berjalan lambat, dengan capaian jumlah sertifikat tanah yang belum memenuhi target. Keempat, koordinasi antar SKPD dalam pengelolaan aset masih belum optimal, menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam penggunaan dan perawatan aset. Terakhir, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang manajemen aset.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui kinerja organisasi satuan kerja perangkat daerah dalam pengelolaan aset daerah di BPKD Kabupaten Malinau. Manfaatnya yaitu membantu mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan dalam sistem pengelolaan aset.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Maliana. Subjek penelitian ini adalah Kepala BPKD, Sekretaris BPKD Kabupaten

Malinau, Kepala Bidang Aset BPKD dan Staf BPKD Kabupaten Malinau. Data-data yang diperlukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri data data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan data primer dikumpulkan secara langsung melalui kegiatan pengamatan langsung atau objek yang diteliti dan kegiatan wawancara yang ditujukan kepada informan yakni sumber data yang sudah ditentukan. Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik pengumpul data primer dan data sekunder

Pengumpulan data dalam kegiatan riset kualitatif harus terkondisi secara natural dan alamiah (*natural setting*), dengan data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam serta studi dokumentasi yang relevan sesuai dengan topik dan variable penelitiannya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Milles dan Huberman yaitu reduksi data, display dan verifikasi data hingga penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas

Efektivitas, sebagai konsep kunci dalam evaluasi kinerja organisasi, merujuk pada kapabilitas suatu entitas untuk menentukan dan mencapai tujuan yang tepat dan relevan (Rulinawaty et al., 2024). Dalam konteks penelitian ini, analisis efektivitas Bidang Pengelolaan Aset Daerah difokuskan pada dua aspek utama: pertama, sejauh mana program dan kegiatan yang diimplementasikan sejalan dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya; dan kedua, tingkat keberhasilan dari program-program tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengevaluasi kesesuaian antara rencana dan implementasi, tetapi juga mengukur dampak nyata dari upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan aset daerah.

Temuan-temuan yang diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam dengan para informan kunci mengindikasikan adanya tingkat kesesuaian yang signifikan antara program kegiatan yang dijalankan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil ini menyoroti kemampuan bidang tersebut dalam menyelaraskan aktivitas operasionalnya dengan tujuan strategis organisasi. Namun, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan objektif, penelitian ini juga akan menyajikan kutipan-kutipan langsung dari para responden. Testimoni ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti empiris yang memperkuat temuan, tetapi juga memberikan nuansa dan konteks yang lebih kaya terhadap realitas pengelolaan aset daerah di lapangan, memungkinkan pembaca untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai efektivitas organisasi. Berikut hasil wawancara dengan para responden/informan:

"Ya sudah sesuai" Kepala BPKD Kabupaten Malinau

"Ya sudah sesuai" Sekretaris BPKD Kabupaten Malinau

"Ya sesuai" Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Malinau

"Ya sudah sesuai" Staf BPKD Kabupaten Malinau

Dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah, salah satu indikator kunci yang digunakan adalah perolehan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara spesifik, pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan

Kalimantan Utara menjadi tolok ukur yang signifikan dalam menilai efektivitas pengelolaan aset daerah. Opini WTP ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mengindikasikan adanya sistem pengendalian internal yang kuat serta transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pernyataan ini dikuatkan oleh testimoni dari pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Malinau, baik Kepala maupun Sekretaris, yang menekankan signifikansi opini WTP tersebut sebagai bukti konkret keberhasilan program dan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan tata kelola aset daerah. Pencapaian ini tidak hanya menjadi sumber kebanggaan bagi jajaran pemerintah daerah, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik di masa mendatang. Berikut adalah pernyataannya:

*"Telah meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kaltara"* Kepala BPKD Kabupaten Malinau

*"Telah meraih opini WTP dari BPK"* Sekretaris BPKD Kabupaten Malinau

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara Kepala Bidang Aset:

*"Tingkat keberhasilan sudah berjalan karena hasil audit BPK yaitu WTP"* Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Malinau

Sedangkan Staf BPKD Kabupaten Malinau dalam wawancaranya menyatakan bahwa tingkat keberhasilan program kerja dilihat dari:

*"Terlaksananya tata kelola inventarisasi aset dalam kegiatan sensus"*

Masyarakat menilai efektivitas Kinerja Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Malinau dengan tersedianya informasi bagi masyarakat mengenai aset tetap yang dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh Pemkab Malinau. Hal ini disampaikan oleh salah satu masyarakat Malinau, Obed parun yaitu:

*"Ya, adanya informasi bagi masyarakat berkaitan dengan hal tersebut".*

Berkaitan dengan efektivitas Kinerja Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Malinau masih adanya kendala dan hambatan yang dihadapi Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam pengelolaan Aset Tetap. Berikut hasil wawancara dengan para responden/informan:

*"Kurang responnya pengurus OPD dalam membuat laporan barang milik daerah dari Organisasi Perangkat Daerah"* Kepala BPKD Kabupaten Malinau

*"Kurang responnya pengurus OPD dalam membuat laporan barang milik daerah OPD"* Sekretaris BPKD Kabupaten Malinau

*"Kendala yang dihadapi pada saat pergantian pengurus barang di OPD yang membuat pengelolaan aset terhambat"* Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Malinau

*"Terkendala dalam hal inventaris aset hasil pengalihan dari propinsi hasil pemekaran"* Staf BPKD Kabupaten Malinau

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi satuan kerja perangkat daerah dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Malinau yang ditinjau berdasarkan efektivitas telah sesuai namun masih terdapat kendala yaitu kurang responnya pengurus OPD dalam membuat laporan barang milik daerah dari Organisasi Perangkat Daerah.

## **Akuntabilitas**

Akuntabilitas, sebagai konsep fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan indikator krusial yang mengukur sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan ekspektasi dan standar yang ditetapkan oleh masyarakat serta para pemangku *kepentingan (stakeholders)*. Konsep ini tidak hanya menekankan pada kesesuaian antara tindakan pemerintah dengan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan persepsi dan harapan publik terhadap kinerja pemerintahan. Dalam konteks penelitian ini, analisis akuntabilitas Bidang Pengelolaan Aset Daerah difokuskan pada tiga dimensi utama: mekanisme pertanggungjawaban, dinamika hubungan timbal balik atau kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku. Pendekatan multidimensi ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana bidang tersebut menjalankan mandatnya dalam mengelola aset daerah secara bertanggung jawab dan transparan.

Dimensi pertama, yaitu pertanggungjawaban, meneliti bagaimana Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyusun dan menyajikan laporan kinerja serta penggunaan sumber daya kepada otoritas yang berwenang dan masyarakat luas. Aspek kedua, hubungan timbal balik atau kerjasama, mengeksplorasi kualitas interaksi dan koordinasi bidang tersebut dengan berbagai pihak, baik internal pemerintahan maupun eksternal, dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset. Sementara itu, dimensi ketiga berfokus pada evaluasi kesesuaian pelaksanaan tugas dengan kerangka hukum dan kebijakan yang ada, mengukur sejauh mana bidang ini mematuhi dan mengimplementasikan peraturan serta arahan strategis dalam pengelolaan aset daerah. Melalui pengkajian mendalam terhadap ketiga aspek ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap tidak hanya efektivitas operasional, tetapi juga integritas dan responsivitas Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam mengemban tugasnya, sekaligus mengidentifikasi area-area potensial untuk peningkatan akuntabilitas di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh bentuk pertanggungjawaban Bidang Pengelolaan Aset Daerah dibuat yaitu dengan membuat laporan atas pengelola aset daerah kepada kepala Badan dan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris dan Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Malinau bahwa:

*"Membuat laporan atas pengelola aset daerah kepada kepala Badan dan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang"*

*"Laporan dibuat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan dilaporkan langsung ke Sekretaris Daerah"*

Hal ini juga didukung hasil jawaban wawancara dengan Kepala BPKD Kabupaten Malinau bahwasanya

*"Laporan atas pengelola aset daerah kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang"*

Sejalan dengan wawancara di atas, staf BPKD Kabupaten Malinau juga menyatakan bahwa:

*"Membuat laporan dan mengadakan rekonsiliasi aset"*

Hubungan multifungsi atau kerjasama Bidang Pengelolaan Aset Daerah yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Malinau yaitu bekerjasama dengan BPKP Kaltara. Kepala BPKD Kabupaten Malinau mengungkapkan bahwa

*"Bekerjasama dengan BPKP Kaltara dalam menyiapkan aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah"*

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh bahwa Sekretaris dan Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Malinau:

*"Bekerjasama dengan BPKP dalam menyiapkan aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah"*

*"Bekerjasama dengan BPKP Perwakilan dalam menyiapkan laporan di aplikasi simda BMD"*

Staf BPKD Kabupaten Malinau juga menyatakan yang sejalan bahwa

*"Bekerjasama dengan OPD lain dalam menjelajah aset"*

Kesamaan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah dengan peraturan dan kebijakan, dalam hasil wawancara dengan responden dapat diketahui bahwa sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada.

*"Ya sesuai"* Kepala BPKD Kabupaten Malinau

*"Ya sudah sesuai"* Sekretaris BPKD Kabupaten Malinau

*"Ya sudah sesuai dengan permendagri No.47 Tahun 2021."* Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Malinau

*"Ya sesuai"* Staf BPKD Kabupaten Malinau

Hal ini terbukti dengan adanya respon dari masyarakat berkaitan dengan akuntabilitas bahwa

*"Dapat dipertanggungjawabkan".*

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam kinerja organisasi satuan kerja perangkat daerah dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Malinau telah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Efisiensi**

Efisiensi, sebagai salah satu prinsip kunci dalam manajemen keuangan publik, merujuk pada optimalisasi penggunaan dana masyarakat untuk menghasilkan output yang maksimal. Dalam konteks penelitian ini, analisis efisiensi difokuskan pada dua aspek utama dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Malinau. Pertama, evaluasi dilakukan terhadap proses perencanaan, pengadaan, dan penggunaan aset tetap, dengan penekanan khusus pada sejauh mana proses-proses tersebut berhasil memenuhi kebutuhan daerah secara tepat dan memadai. Aspek ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengalokasikan sumber daya untuk aset-aset yang benar-benar dibutuhkan, tanpa pemborosan atau pengadaan yang berlebihan. Kedua, penelitian ini juga meneliti efisiensi dari sudut pandang pemanfaatan aset tetap dan berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam upayanya memenuhi kebutuhan masyarakat. Fokus ini bertujuan untuk menilai sejauh mana aset-aset yang dimiliki tidak hanya digunakan secara optimal, tetapi juga memberikan manfaat langsung dan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan para responden:

*"Ya"* Kepala BPKD Kabupaten Malinau

*"Ya telah digunakan sebagaimana mestinya"* Sekretaris BPKD Kabupaten Malinau

*"Ya sesuai dengan ketentuan OPD"* Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Malinau

*"Ya"* Staf BPKD Kabupaten Malinau

Pemanfaatan aset tetap dan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menurut Kepala BPKD Kabupaten Malinau yaitu dengan pemanfaatan dalam bentuk sewa atas

pemakaian aset tetap dan aset tetap yang sudah tidak digunakan ataupun tidak dihapuskan dapat dipinjamkan dan dihibahkan kepada organisasi Masyarakat. Berikut pernyataannya:

*"Pemanfaatan dalam bentuk sewa atas pemakaian aset tetap. Ya dapat dipinjamkan dan dihibahkan kepada organisasi Masyarakat"*

Hal ini juga sependapat dengan Sekretaris BPKD Kabupaten Malinau bahwasanya

*"Pemanfaatan dalam bentuk sewa atas pemakaian aset tetap. Ya dapat dipinjamkan dan dihibahkan kepada organisasi Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku"*

Selanjutnya, Kepala Bidang Aset dan Staf BPKD Kabupaten Malinau berpendapat bahwa

*"Sangat bermanfaat karena untuk kebutuhan fasilitas umum. Ya untuk aset yang diserahkan kepada Masyarakat dan yang dipinjam pakai sudah dibuat sesuai dengan permendagri 47 Tahun 2021"*

*"Aset daerah dimanfaatkan untuk fasilitas umum. Ya dapat diinjamkan dan dihibahkan"*

Berdasarkan informasi yang ada, dapat dipahami bahwa aset tetap yang tidak lagi dimanfaatkan atau belum dihapus dari daftar inventaris masih memungkinkan untuk dipinjamkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pandangan ini diutarakan oleh seorang anggota masyarakat bernama Obed Parun.

*"Bisa dipinjamkan sesuai ketentuan"*

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Malinau telah menunjukkan kinerja yang efisien dalam mengelola aset daerah. Hal ini dibuktikan dengan implementasi pengelolaan aset yang sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Kinerja SKPD dalam mengelola aset daerah di Malinau patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga dan memelihara aset daerah secara optimal.

## **Transparansi**

Transparansi bagaikan pilar fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip ini mewajibkan pemerintah untuk membuka seluas-luasnya informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah. Keterbukaan informasi ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pengelolaan aset daerah, transparansi menjadi kunci utama untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan aset. Aset daerah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari kekayaan negara lainnya yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola aset ini secara transparan dan akuntabel. Transparansi dalam pengelolaan aset daerah akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan aset daerah, berdasarkan wawancara dengan Kepala BPKD Kabupaten Malinau bahwa:



*"Masyarakat dapat membuka dan terlihat sukses yang ada di bidang aset atas informasi pengelolaan aset."*

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Sekretaris BPKD Kabupaten Malinau

*"Masyarakat dapat membuka dan terlihat sukses yang ada di bidang aset atas informasi pengelolaan aset."*

Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Malinau dalam wawancaranya menyatakan bahwa

*"Semua aset pemerintah kab. Malinau bisa langsung di akses dengan koordinasi dengan pengelola bidang aset"*

Hal ini juga didukung dengan pernyataan Staf BPKD Kabupaten Malinau bahwa:

*"Bisa diakses langsung dan juga koordinasi dengan pengelola bidang aset"*

Menanggapi poin terkait keterbukaan informasi pengelolaan aset tetap daerah kepada publik, Obed Parun, sebagai perwakilan masyarakat, menyampaikan pendapatnya:

*"Informasi disampaikan melalui media yang disediakan oleh pemerintah kab. Malinau"*

Berkaitan dengan upaya meningkatkan transparansi pengelolaan aset tetap kepada publik, para responden menyarankan pelaksanaan sosialisasi sebagai strategi utama.

*"Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat atas pengelolaan aset tetap"*

Kepala BPKD Kabupaten Malinau

*"Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat atas pengelolaan aset tetap kepada publik"* Sekretaris BPKD Kabupaten Malinau

*"Melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan baik didesa sampai ke RT"*

Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Malinau

*"Melakukan sosialisasi dengan Masyarakat" Staf BPKD Kabupaten Malinau*

Kesimpulan hasil wawancara tersebut yaitu bahwa transparansi dalam pengelolaan aset tetap daerah, Kabupaten Malinau telah terbuka dengan menyediakan informasi melalui media. Dalam pelaksanaan transparansi tersebut, tentunya terdapat kendala yang dihadapi. Berikut pernyataan dari para responden:

*"Kurangnya saran dan masukan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan aset tetap"* Kepala BPKD Kabupaten Malinau

*"Kurangnya sarana untuk meningkatkan transparansi pengelolaan aset tetap kepada Masyarakat."* Sekretaris BPKD Kabupaten Malinau

*"Kurangnya saran dan masukan untuk pengelolaan aset tetap kepada Masyarakat"* Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Malinau

*"Kurangnya sarana dalam menyampaikan masalah Masyarakat terhadap pengelolaan aset daerah."* Staf BPKD Kabupaten Malinau

Analisis terhadap informasi yang dipaparkan sebelumnya mengungkapkan bahwa hambatan utama bagi BPKD Kabupaten Malinau dalam mencapai transparansi pengelolaan aset tetap daerah adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk mendiseminasikan informasi kepada publik.

## **PEMBAHASAN**

### **Efektivitas**

Keberhasilan Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat diukur melalui evaluasi komprehensif terhadap kinerja organisasinya. Aspek kinerja selalu menjadi topik yang relevan dan krusial dalam setiap entitas organisasi, mengingat perannya sebagai indikator utama efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep kinerja organisasi, sebagaimana didefinisikan oleh Wibawa dan Atmosudirdjo, mencakup keseluruhan efektivitas organisasi dalam memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan oleh setiap kelompok terkait. Proses ini melibatkan upaya-upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut secara lebih efektif.

Lebih lanjut, kinerja organisasi memiliki korelasi yang erat dengan berbagai elemen penting dalam manajemen organisasi. Hal ini meliputi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, perencanaan strategis, serta implementasi sistem manajemen yang efektif di dalam struktur organisasi (Alfian, 2017). Oleh karena itu, evaluasi kinerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mempertimbangkan proses dan strategi yang diterapkan dalam mencapai tujuan tersebut. Penilaian menyeluruh ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan, sehingga dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

Dalam upaya mencapai efektivitas kinerja organisasi, faktor kunci yang tidak dapat diabaikan adalah pengelolaan sumber daya manusia. Manusia, sebagai aktor utama dalam organisasi, memainkan peran vital dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat krusial dan menentukan. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada kualitas dan kinerja individu-individu yang ada di dalamnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi secara keseluruhan merupakan akumulasi dari kinerja masing-masing anggota atau staf yang berkontribusi di dalamnya (Herman et al., 2022).

Evaluasi terhadap kinerja organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Malinau, khususnya dalam konteks pengelolaan aset daerah, menunjukkan hasil yang menggembirakan ditinjau dari aspek akuntabilitas. Berdasarkan penilaian yang dilakukan pada tahun 2022, tingkat akuntabilitas dalam manajemen aset daerah telah mencapai standar yang diharapkan dan mampu memenuhi kriteria pertanggungjawaban yang ditetapkan. Capaian ini merefleksikan komitmen dan upaya konsisten dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara transparan dan bertanggung jawab.

Pencapaian akuntabilitas ini dapat diverifikasi melalui serangkaian indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja. Indikator-indikator tersebut mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan aset, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Keberhasilan dalam memenuhi standar akuntabilitas ini tidak hanya menunjukkan efektivitas operasional OPD, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malinau. Hal ini menjadi fondasi penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

### **Akuntabilitas**

Evaluasi terhadap kinerja organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Malinau, khususnya dalam konteks pengelolaan aset daerah, menunjukkan hasil yang menggembirakan ditinjau dari aspek akuntabilitas. Berdasarkan penilaian yang dilakukan pada tahun 2022, tingkat akuntabilitas dalam manajemen aset daerah telah mencapai standar yang diharapkan dan mampu memenuhi kriteria pertanggungjawaban yang ditetapkan. Capaian ini merefleksikan komitmen dan upaya konsisten dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara transparan dan bertanggung jawab.

Pencapaian akuntabilitas ini dapat diverifikasi melalui serangkaian indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja. Indikator-indikator tersebut mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan aset, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Keberhasilan dalam memenuhi standar akuntabilitas ini tidak hanya menunjukkan efektivitas operasional OPD, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malinau. Hal ini menjadi fondasi penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

### **Efisiensi**

Efisiensi Kinerja Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Malinau telah dijalankan dengan sesuai. Berdasarkan hasil penilaian kinerja organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Malinau tahun 2022, menunjukkan bahwa efisiensi kinerja pengelolaan aset daerah telah dijalankan dengan sesuai.

Pemerintah Kabupaten Malinau telah mendemonstrasikan dedikasi yang signifikan dalam upaya optimalisasi nilai aset daerah. Salah satu manifestasi konkret dari komitmen ini adalah implementasi program pemeliharaan dan renovasi aset yang dilaksanakan secara berkala dan sistematis. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan kondisi fisik aset, tetapi juga untuk meningkatkan nilai dan fungsinya dalam jangka panjang. Pendekatan proaktif ini mencerminkan visi pemerintah daerah dalam mengelola aset secara efektif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan efisiensi. Strategi ini juga mengindikasikan kesadaran pemerintah akan pentingnya preservasi dan peningkatan nilai aset sebagai komponen integral dari pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Evaluasi komprehensif terhadap efisiensi kinerja dalam manajemen aset daerah di Kabupaten Malinau menunjukkan hasil yang positif dan memuaskan. Capaian ini merupakan hasil dari sinergi berbagai faktor pendukung. Di satu sisi, terdapat komitmen yang kuat dan upaya konsisten dari pihak pemerintah daerah dalam mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan aset yang efektif. Di sisi lain, terdapat kontribusi signifikan dari masyarakat setempat yang menunjukkan tingkat kesadaran dan partisipasi yang tinggi dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan aset daerah. Kombinasi antara kebijakan pemerintah yang terstruktur dan dukungan aktif masyarakat telah menciptakan ekosistem yang kondusif untuk optimalisasi pengelolaan aset daerah, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan di Kabupaten Malinau.

## **Tranparansi**

Prinsip transparansi dalam konteks manajemen aset tetap daerah merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Implementasi transparansi ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan bertujuan untuk menyediakan akses informasi yang komprehensif dan akurat kepada publik mengenai seluruh aspek pengelolaan aset daerah. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, masyarakat diberdayakan untuk berperan aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan aset publik. Hal ini menciptakan mekanisme *check and balance* yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya daerah.

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan aset daerah memiliki implikasi yang luas terhadap kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Dengan tersedianya informasi yang transparan, terbuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan aset. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen aset daerah. Selain itu, transparansi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah. Dengan demikian, transparansi bukan hanya menjadi alat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, tetapi juga menjadi katalis bagi terciptanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah demi kesejahteraan bersama.

Kabupaten Malinau telah berupaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset tetap daerah, salah satunya dengan menyediakan informasi melalui media. Informasi tersebut meliputi data dan laporan tentang aset tetap daerah, seperti jenis aset, lokasi, nilai, dan status penggunaan. Meskipun telah berupaya untuk meningkatkan transparansi, namun BPKD Kabupaten Malinau masih menghadapi beberapa masalah, salah satunya adalah kurangnya sarana dan saran untuk pengelolaan aset tetap kepada masyarakat. Hal ini dapat menghambat masyarakat untuk memahami informasi yang telah disediakan oleh BPKD.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi satuan kerja perangkat daerah dalam pengelolaan aset daerah di BPKD Kabupaten Malianau sudah baik yaitu dalam hal efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan tranparansi walaupun masih ada beberapa dalam pelaksanaanya

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfian, N. I. (2017). Kinerja Organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Dalam Pengelolaan Aset Tetap. *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol 7 No 1
- Alvianto, M. N. H., Adam, N. P., Sodik, I. A., Sedyono, E., & Widodo, A. P. (2022). Dampak Dan Faktor Kesuksesan Penerapan Enterprise Resource Planning Terhadap Kinerja Organisasi: Sitematic Literature Review. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 7(3), 172-180.

- Azhar, A. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3), 189-197.
- Dahkoul, Zuheir Mohamed. (2018). The Determinants of Employee Performance in Jordanian Organizations. *Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA)*, V.5, Iss.1.
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan sistem e-budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72-102.
- Herman, Dkk. (2022). Analisis Determinan Kinerja Organisasi Sektor Publik Pada Kantor Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda Kalimantan Timur (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa). *Idn. J. Of Business And Management*, 5(1), Desember 2022, Halaman: 43-50.
- Hidayat, T. W., & Riharjo, I. B. (2015). Pengukuran Kinerja Unit Kerja Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(11).
- Kusumastuti, D., Sugiama, A. G., & SE, M. (2019). Pengertian Manajemen Aset dan Logistik serta Manajemen Rantai Pasokan. *Manajemen Logistik Organisasi Publik*, 1-46.
- Lauma, E. B., Morasa, J., & Kalangi, L. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *ACCOUNTABILITY*, 5(2), 84-97.
- Mulyono, Imam dkk (2018). Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia Vol. 12 No.2*. Diakses Agustus 2018.
- Mursalim, N., & Wijaya, A. (2023). Analysis Of Capital Expenditure Recording In Asset Management At The Department Of Education And Culture City Of Parepare. *Journal AK-99*, 3(1), 170-179.
- Razak, A., & Sarpan., R. (2018). Effect of Leadership Style, Motivation and Work Discipline on Employee Performance in PT. ABC Makassar. *International Review of Management and Marketing*. Vol 8 Issue 6.
- Rulinawati, Samboteng, L., Wijaya, A., Tahili, M. H., & Halim, R. (2024). Enhancing Trust-Based Governance and Collaborative Innovation Based on Routine Dynamics in Central Sulawesi Province. *Public Policy and Administration*, 23(2), 274–294. <https://doi.org/10.13165/VPA-24-23-2-11>
- Rulinawaty; dkk. (n.d.). *Kompleksitas dan Dinamika Birokrasi Di Indonesia* (Alvian Rac). CV. Literakata Karya Indonesia, Karanganyar 2023.
- Rulinawaty, Arifin, S., & Samboteng, L. (2020). LEADING AGILE ORGANIZATION Can Indonesian Bureaucracy become agile? *International Research Association for Talent Development and Excellence*, 12(1). <http://iratde.com/index.php/jtde>
- Rulinawaty Kasmad, Samboteng, L., & Mahsyar, A. (2019). The Unwise Policy Of Community Based-Organisation: Can It Empower Them? Implementation Network Of Food Diversification In Indonesia Rulinawaty. *OPCION*, 35(22), 2900–2961. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rulinawaty, Samboteng, L., Purwanto, A. J., Kuncoro, S., Jasrial, Tahilili, M. H., Efendi, Y., & Karyana, A. (2024). Investigating the influence of the updated

- DeLone and McLean information system (IS) success model on the effectiveness of learning management system (LMS) implementation. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2365611>
- Susanto, Y., & Yuliana, Y. (2021). Employee Performance Analysis At The Regional Financial And Asset Management Agency Of Musi Rawas Regency. *Sosiohumaniora*, 23(3), 418-428.
- Wahyudin, A., & Zohriah, A. (2023). Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan. *Journal on Education*, 6(1), 3822-3835.
- Winarja, W., Sodikin, A., & Widodo, D.S. (2018). The effect of Organizational Commitment and Job Pressure to Job Performance through the Job Satisfaction in Employees Directorate transformation Technology Communication and Information Indonesia. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 4(2).
- Zahratulfarhah, Z., Mandasari, A. R., Rani, D. S., Maysaroh, M., Asyharul, M., & Afifah, Z. N. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan Kerja (Literature Review Metodologi Riset Bisnis). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 118-130.